

## ANALISIS IMPLEMENTASI *ENTREPRENEURIAL COMPETENCY* DI LPP KELAS 1A TANGERANG

<sup>1</sup>Gunartin, <sup>2</sup>Raden Ai Lutfi Hidayat, <sup>3</sup>Ian Permana Wahyu

<sup>1,2,3</sup>Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pamulang  
E-mail: gunartin9472@gmail.com

### ABSTRACT

*The purpose of this writing is to analyze how the implementation entrepreneurial competencies of inmates in Correctional Institutions. So that it can form Correctional Assisted Residents (WBP) who are skilled, independent and have character. In this study, a qualitative method of phenomenological approach was used as an effort to understand certain events or situations, and researchers tried to enter the subject under study in the hope of understanding what and how a subject could be developed. Through observational data collection techniques, in-depth interviews, and documentation it is hoped that researchers will be able to obtain the necessary data. The results of the research show that this research is intended to provide benefits in the form of recommendations for coaching patterns so that prisoners are competent in entrepreneurship and are economically independent so that they can contribute to the country's development. The Technology Readiness Level (TKT) used is TKT 2 and the research results will be published in an accredited national journal.*

*Keywords: Entrepreneurial Competencies; Penitentiary.*

### ABSTRAK

Tujuan dari penulisan ini untuk menganalisa bagaimana implementasi *entrepreneurial competencies* warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan. Sehingga dapat membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang trampil, mandiri dan berkarakter. Pada penelitian ini digunakan metode kualitatif pendekatan fenomenologi sebagai upaya memahami peristiwa atau situasi kondisi tertentu, dan peneliti berusaha memasuki subjek yang diteliti dengan harapan dapat mengerti Apa dan bagaimana sesuatu subjek tersebut dapat dikembangkan. Melalui teknik pengumpulan data observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi diharapkan peneliti dapat memperoleh data yang diperlukan. Hasil penelitian menunjukkan Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan manfaat dalam bentuk rekomendasi pola pembinaan agar WBP berkompeteran berwirausaha dan mandiri secara ekonomi sehingga dapat berkontribusi pada pembangunan negara. Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT) yang digunakan yaitu TKT 2 dan hasil penelitian akan dipublikasi di jurnal nasional terakreditasi.

Kata Kunci: Kompetensi Berwirausaha, Lembaga Pemasyarakatan

### PENDAHULUAN

Perhatian pemerintah bagi warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dengan dikeluarkannya Permen Hukum dan HAM RI No 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan. Dasar pertimbangan melakukan pembinaan ini, agar warga binaan pemasyarakatan (WBP) tidak mengulang perbuatan pelanggaran hukum dan mendidik warga binaan memiliki keterampilan sosial dan berwirausaha yang didukung dengan situasi Aman dan kondusif.

Program pembinaan warga binaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi produksi barang atau jasa berskala industri. pada ayat (2) menunjukkan perubahan sikap dan perilaku, peningkatan kompetensi dan kemampuan diri, serta peningkatan kemandirian dan tingkat produktifitas. Lembaga Pemasyarakatan memiliki fungsi membentuk WBP agar menjadi manusia yang lebih baik, menyadari kesalahan yang telah dilakukan, serta tidak mengulang kembali pelanggaran hukum yang pernah dilakukan, sehingga dapat

berperan aktif, kembali melanjutkan kehidupannya ke masyarakat serta berkontribusi penguatan bangsa dan negara (Rivai, 2014).

Pembinaan kemandirian di dalam Lapas dilakukan dalam bentuk pemberian latihan keterampilan dan kegiatan kerja/produksi bagi warga binaan. Pemberian latihan dan kegiatan kerja bagi warga binaan ini, selain bertujuan membantu warga binaan mengembangkan dirinya dan mempersiapkan dirinya untuk kembali ke masyarakat dengan memberi bekal keterampilan kepada mereka, juga merupakan terapi untuk menumbuhkan rasa percaya diri dan menghindarkan diri mereka dari kegiatan-kegiatan yang tidak diinginkan. Kegiatan latihan keterampilan dan kegiatan kerja bagi warga binaan merupakan kewajiban, sekaligus sebagai bagian dari proses pembinaan kemandirian yang diberikan kepada warga binaan selama menjalani masa pidananya. Kegiatan kerja juga merupakan bagian aktifitas warga binaan untuk menambah pengetahuan dan keterampilan serta penghasilan. Jadi tujuan pembinaan kemandirian adalah memberikan nilai tambah kehidupan dan penghidupan warga binaan pemsayarakatn (WBP) baik selama menjalani masa pidananya maupun setelah selesai menjalani masa pidananya.

Pembinaan kemandirian dimaksudkan untuk mencapai tujuan Pemsayarakatan, yaitu untuk membentuk WBP menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana, dapat berperan dalam pembangunan, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, maka setiap WBP akan menjalani pembinaan selama menjalani masa pidananya. Pembinaan yang dilaksanakan di dalam Lapas/Rutan diklasifikasikan dalam pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian.

Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak WBP agar menjadi manusia seutuhnya, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan bertanggung jawab pada diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Sedangkan Pembinaan Kemandirian dilaksanakan dengan maksud agar WBP memiliki bekal keterampilan yang cukup, sehingga setelah bebas diharapkan mampu bersaing dalam bursa tenaga kerja dan/atau dapat hidup mandiri sehingga dapat berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Pembinaan kemandirian berupa latihan keterampilan dan kegiatan kerja/produksi bagi warga binaan ini secara operasional dilaksanakan oleh suatu Bimbingan Kerja (Bimker) berdasarkan Surat Edaran Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01-PK.03.01 Tahun 1989 Tentang Tata Laksana Pengelolaan dan Pengadministrasian Kegiatan Bimbingan Kerja. Bimbingan kerja ini diharapkan mampu mewujudkan kegiatan pelatihan dan kegiatan produksi yang ideal sebagaimana yang dicita-citakan. Secara ideal, kegiatan pelatihan yang dicitacitakan adalah sebuah lembaga pelatihan vokasional profesional yang memiliki ciri sebagai berikut:

1. Adanya satu atau lebih kegiatan pelatihan yang aktif dan berkesinambungan;
2. Semua warga binaan aktif mengikuti salah satu atau lebih kegiatan pelatihan yang ada di Lapas/Rutan;
3. Sarana prasana pendukung kegiatan pelatihan tersedia cukup memadai;
4. Terdapat kurikulum dan silabus baku yang tertulis untuk setiap kegiatan pelatihan, sehingga kegiatan tersebut akan tetap berjalan meskipun instruktur berganti atau berhalangan;

5. Jumlah instruktur teknis yang kompeten cukup memadai.

Adapun kegiatan kerja/produksi ideal yang dicita-citakan adalah kegiatan produksi dengan ciri-ciri sebagai berikut:

1. Adanya satu atau lebih kegiatan produksi yang berorientasi profit dan pasar;
2. Menghasilkan produk barang dan/atau jasa yang bermutu, kompetitif dan sesuai dengan selera/harapan pasar/konsumen;
3. Sarana prasana pendukung kegiatan produksi tersedia cukup memadai dan modern;
4. Banyak warga binaan yang terlibat dalam kegiatan produksi yang sudah memiliki keahlian khusus sesuai dengan tuntutan kegiatan produksi;
5. Kegiatan produksi (dari pra produksi, produksi hingga pemasaran) dikelola secara transparan, akuntabel dan profesional dan dikelola oleh para personil yang kompeten dalam jumlah yang memadai;
6. Melibatkan peran aktif pihak ketiga dalam upaya pengembangan dan penguatan kegiatan produksi.

Pembinaan kemandirian WBP di Lapas mengarah pada industri kreatif yang merupakan pendukung UMKM diyakini menjadi solusi ekonomi negara setelah resesi ekonomi terkait penyediaan lapangan kerja dan mempertahankan vitalitas ekonomi negara. Industri kreatif juga berhasil mempertahankan nilai tambah dan kekayaan ekonomi serta menunjukkan pentingnya kreatif industri (Kakiuchi 2014). Dari beberapa definisi industri kreatif tersebut dapat diartikan bahwa industri kreatif menitikberatkan pada ketrampilan individu, kreatifitas, dan inovasi untuk menghasilkan gagasan untuk produk barang maupun jasa.

Namun pada kenyataannya bimbingan kerja yang ada di Lapas saat ini umumnya kurang dapat berperan sebagaimana yang diharapkan. Ini menunjukkan adanya banyak permasalahan/kendala yang dihadapi oleh bimbingan kerja. Kondisi ini jelas menuntut adanya upaya pengembangan dan penguatan yang komprehensif dan berkesinambungan agar bengkel kerja pada setiap Lapas dapat menjadi bengkel kerja produktif. Kenyataan yang ada pemberian keterampilan tersebut belum terlaksana secara optimal di mana salah satu penyebabnya adalah kurang memadainya kualitas sumber daya manusia petugas pasyarakatan bidang latihan keterampilan yang tersedia di lembaga pasyarakatan.

Menurut (Parker, 2005) kemandirian ditunjukkan dari aspek: tanggung jawab, otonomi, inisiatif, dapat mengendalikan diri. Sedang ekonomi merujuk pada perwujudan upaya pencapaian kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa (Caporaso & Levine, 2008). Pembinaan kemandirian yang dilakukan oleh Lapas untuk warga binaannya merupakan bagian dari menyiapkan WBP saat sudah selesai menjalani masa pidannya dan kembali ke masyarakat harapannya dapat membuka usaha sendiri bermodalkan keterampilan dan pengalaman yang telah diperoleh selama menjadi WBP. Kemandirian ekonomi harus diwujudkan terutama bagi WBP, dengan berbagai kegiatan positif (Firman, nataranews.com) Berdasarkan fenomena dII Atas fokus penelitian ini menganalisis implementasi *entrepreneur competency* di lingkungan LPP Kelas 1A Tangerang pada program kegiatan dan keterampilan kerja melalui pembinaan kemandirian. Berdasarkan beberapa paparan tersebut dapat disampaikan bahwa *entrepreneurial competencies* semua

hal yang menunjang keberhasilan usaha yang meliputi unsur sikap, keyakinan kepribadian, perilaku, pengetahuan, ketrampilan, dan kemampuan.

Tujuan dari penulisan ini untuk menggali bagaimana proses penguatan nilai-nilai internalisasi *entrepreneurial competencies* warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan sehingga dapat membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang trampil, mandiri dan berkarakter sehingga mandiri secara ekonomi. Berdasarkan *research gap* tersebut maka penelitian ini penting untuk dilakukan karena Lapas merupakan tempat atau wadah yang memiliki potensi untuk membangun *entrepreneurial competenceis*. Dengan sumber daya ekonomi yang dimiliki, yaitu: kurikulum, SDM, Sarpras dan dana, ada permasalahan apa sehingga tujuan pembinaan yang dilakukan Lapas pada WBP kurang optimal. Berdasarkan urgensinya, maka penelitian ini diajukan fokus pada bidang sosial humaniora.

## **METODE**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, di mana dalam proses penelitian yang digunakan berdasarkan teori yang relevan dengan permasalahan yang diteliti untuk menemukan solusi dalam permasalahan tersebut. Menurut Sugiono (2015: 9) penelitian kualitatif sangat cocok diterapkan antara lain untuk meneliti hal-hal sebagai berikut:

1. Bila masalah penelitian belum jelas, masih remang-remang, atau bahkan masih gelap. Metode kualitatif sangat cocok diterapkan pada kondisi semacam ini karena peneliti akan langsung masuk ke lapangan sehingga masalah akan ditemukan dengan jelas.
2. Metode kualitatif sangat cocok untuk memahami makna dibalik yang tampak. Gejala sosial sering tidak bisa dipahami berdasarkan apa yang diucapkan dan dilakukan orang.
3. Metode kualitatif sangat cocok untuk memahami interaksi sosial. Interaksi sosial yang kompleks hanya dapat diurai jika peneliti menggunakan metode kualitatif antara lain dengan cara observasi terlibat dan wawancara mendalam terhadap kelompok sosial yang diteliti.

Alasan memilih pendekatan kualitatif karena hal ini berkaitan dengan konsep judul dan permasalahan yang dikemukakan pada pendahuluan yang mengarah pada fakta akan implementasi *entrepreneurial competencies* melalui program pelatihan pada pembinaan kemandirian di lingkungan Lapas. Salah satu alasan mengapa seseorang melakukan penelitian kualitatif adalah karena topik yang diteliti perlu dieksplorasi. Sementara metode ini dipilih oleh peneliti karena tujuan dari penelitian ini menganalisis implementasi kegiatan dan keterampilan kerja yang dilakukan di Lapas Tangerang. Kemudian menurut Sugiyono (2015: 2) bahwa penelitian kualitatif dilakukan apabila kondisi pada saat peneliti memasuki obyek, selama berada di obyek, dan setelah keluar dari obyek, kondisi obyek yang diteliti relatif tidak berubah. Dengan kata lain penelitian ini adalah penelitian naturalistik karena penelitian dilakukan oleh obyek dalam kondisi yang alamiah atau apa adanya. Dari beberapa pendapat di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian kualitatif ini sangat cocok dengan kondisi yang ada pada keadaan dan kondisi Lapas Perempuan Kelas 1A Tangerang.

Desain penelitian yang digunakan peneliti Adalah penelitian fenomenologi, dimana penelitian fenomenologi merupakan jenis penelitian kualitatif yang melihat secara dekat interpretasi individual tentang pengalamannya. Sementara dilihat dari pengertian tersebut maka tujuan penelitian fenomenologi adalah menjelaskan pengalaman seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu salah satu karakteristik penelitian kualitatif adalah pengumpulan data dilakukan secara fenomenologis, yaitu dengan memahami secara mendalam gejala atau fenomena yang dihadapi. Dari pendapat tersebut berarti bahwa peneliti Adalah salah satu alat atau instrument pengumpul data sehingga keberadaanya tidak terpisahkan dengan apa yang diteliti. Dengan alasan karena penelitian ini diarahkan untuk memahami dan menganalisa implementasi *entrepreneurial competencies* melalui program latihan dan ketrampilan kerja sebagai bentuk pembinaan kemandirian, sehingga peneliti mampu menguraikan penjelasan dari fenomena-fenomena yang ada.

Data yang diambil dari LPP Kelas 1A Tangerang berupa wawancara, observasi dan aspek Kebijakan instansi yang diambil dari orang-orang yang ada didalamnya. Setelah data telah terkumpul lalu dianalisis dengan analisis deskriptif kualitatif dan kemudian bisa digunakan dalam pengambilan keputusan untuk proses perbaikan masa yang akan datang.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Paparan hasil penelitian memberikan gambaran tentang Implementasi *entrepreneurial competencies* di Lembaga Pemasayaran, kebermanfaatan *entrepreneurial competencies* bagi warga binaan Lembaga Pemasarakatan. Kewirausahaan berbasis *entrepreneurial competencies* warga binaan di internal Lapas diimplementasikan dalam bentuk program pembinaan kepribadian dan kemandirian. *Entrepreneurial competencies* meliputi katagori sikap, pengetahuan dan ketrampilan. Basis *entrepreneurial competencies* membangun kewirausahaan, dalam prosesnya kategori sikap untuk membentuk karakter diimplementasikan dalam program pembinaan kepribadian. Sedangkan katagori pengetahuan dan ketrampilan diimplementasikan dalam bentuk program pembinaan kemandirian melalui program pelatihan keterampilan. Hasil penelitian ini untuk menjawab fokus penelitian secara teori maupun empirik membangun model kewirausahaan berbasis *entrepreneurial competencies* bagi warga binaan pemsarakatan menuju kemandirian ekonomi.

### **Bagaimana Implementasi *Entrepreneurial Competencies* Warga Binaan di Lembaga Pemasarakatan**

Sistem pemidanaan di Indonesia telah mengalami perubahan yang ditandai dengan tidak berlakunya sistem stelsel kepenjaraan yang berganti menjadi sistem pemsarakatan. Dr. Saharjo, SH mengajukan konsep hukum nasional baru, digambarkan dengan sebuah pohon beringin yang melambangkan pengayoman, yaitu sebagai perwujudan tempat berteduh bagi seluruh rakyat, dan pemikiran baru bahwa tujuan pidana penjara adalah pemsarakatan. Konsep ini dikenal sebagai konsep "pemsarakatan" atau sosialisasi, dan telah diterapkan pada tahun 1960-an. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemsarakatan sebagai tonggak perubahan sistem pemidanaan. Dalam sistem pemsarakatan WBP diberikan hak-hak sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995. Hak-hak tersebut dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Seiring perjalanan waktu dan melihat kebutuhan pada sistem pemasyarakatan maka terbitlah Permen Hukum dan HAM RI No 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan. Pasal 1 poin 14 dijelaskan bahwa Lapas adalah tempat menjalankan fungsi pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Dasar pertimbangan melakukan pembinaan ini, agar WBP tidak mengulang perbuatan pelanggaran hukum dan mendidik warga binaan memiliki keterampilan sosial dan berwirausaha yang didukung dengan situasi aman dan kondusif. Dalam proses mendidik warga binaan agar memiliki ketrampilan sosial dan berwirausaha diimplementasikan dalam bentuk pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian di internal Lapas, guna menumbuhkan jiwa *entrepreneur* yang kompeten, maka didasarkan pada pembentukan sikap, memberikan pengetahuan dan ketrampilan yang menjadi katagori dari *entrepreneurial competencies*. Proses implementasi *entrepreneurial competencies* didukung hasil wawancara dengan informan yang terlibat langsung dalam program pembinaan yaitu Kasie Kegiatan Kerja LPP Kelas IIA Tangerang, beliau menyampaikan:

*“Program pembinaan ini banyak, jadi mereka itu ada rehabilitasi, integrasi, kemandirian. Program-program itu termasuk seksi kegiatan pembinaan. Ada pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Untuk pembinaan kemandirian ini kita lakukan pelatihan, bekerjasama dengan pihak ketiga dan bersertifikat.”*

Penjelasan tentang program pembinaan di Lapas sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan pemasyarakatan yaitu memiliki ketrampilan dan berwirausaha untuk reintegrasi sosial juga disampaikan oleh Kepala Lapas Perempuan Kelas II Tangerang, Ibu Esti yaitu:

*“Oleh karenanya berdasarkan Undang Undang tersebut sekarang lembaga pemasyarakatan melakukan pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Untuk pembinaan kemandirian, sistem pemasyarakatan memiliki konsep industri dengan melibatkan pihak ketiga yang menjadi mitra kerja.”*

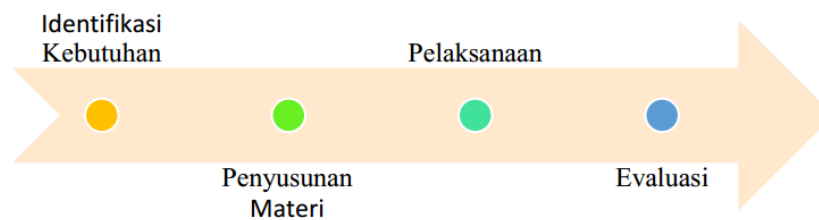
Dari hasil wawancara tersebut merupakan penjelasan kembali terkait pembinaan di Lapas secara umum meliputi pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian sebagai implementasi Peraturan Pemerintah RI No.31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, yang berbunyi:

*“Pengertian Pembinaan terhadap WBP adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan Pembinaan diperuntukan kepada Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan meliputi kegiatan Pembinaan Kepribadian dan Kemandirian bahwa Kegiatan Pembinaan Kepribadian dan Kemandirian meliputi hal-hal yang berkaitan dengan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; kesadaran berbangsa dan bernegara; intelektual; sikap dan perilaku; kesehatan jasmani dan rohani; kesadaran hukum; reintegrasi sehat dengan masyarakat; keterampilan kerja; dan latihan kerja serta produksi.”*

Paparan terkait pembinaan kepribadian juga diperkuat dengan pernyataan Kasie Kegiatan Kerja, beliau menyampaikan:

“Pembentukan sikap melalui pembinaan kepribadian kami lakukan dengan memberikan pembinaan keagamaan, peningkatan iman dan ketaqwaan, sehingga harapannya yang hubungannya dengan Tuhan tidak terlalu dekat, sholatnya jarang dan sebagainya, kami ikutkan pondok pesantren di dalam. Diikuti sesuai dengan agama masing-masing. Nah terkait dengan kehidupan, hubungan sesama manusia agar mereka bisa mengikuti norma-norma di masyarakat, di keluarga, kami berikan pembinaan kepribadian. Pembinaan kepribadian ini ada lima termasuk pembinaan keagamaan tadi, dan empat lainnya adalah pembinaan intelektual, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan hukum, pembinaan seni dan olahraga.”

Berdasarkan informasi-informasi di atas dapat disimpulkan bahwa proses pembentukan sikap diimplementasikan dalam bentuk pembinaan kepribadian yang meliputi pembinaan: keagamaan, intelektual, kesadaran berbangsa dan bernegara, kesadaran hukum serta pembinaan seni dan olah raga. Implementasi *entrepreneur competencies* katagori pengetahuan dilaksanakan dalam bentuk pembinaan kemandirian yang diberikan pada tahap lanjutan melalui pendidikan, pelatihan kerja dan kegiatan sosial. Dalam Proses memberikan wawasan pengetahuan pada WBP meliputi beberapa langkah yang disajikan pada Gambar 3.5 sebagai berikut:



**Gambar. 1. Langkah-Langkah Proses Pembinaan Kemandirian**

Sumber: Dikelola oleh peneliti

Gambar di atas secara rinci dapat dijelaskan bahwa pada langkah-langkah sebagai berikut:

1. Langkah pertama, identifikasi kebutuhan. Dalam memberikan pengetahuan dalam bentuk pembinaan pendidikan dan pelatihan yang tepat sasaran dan tepat manfaat pada WBP, maka dilakukan identifikasi kebutuhan melalui observasi dan wawancara. Didukung hasil Litmas pada saat WBP menjalani masa tahap awal.
2. Langkah kedua, penyusunan materi pembelajaran Langkah kedua ini dilakukan penyusunan materi pembelajaran, pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pengetahuan WBP hasil dari langkah pertama.
3. Langkah ketiga, pelaksanaan pembelajaran, Pelaksanaan pembelajaran dilakukan melalui kegiatan pembinaan dan pelatihan kerja berdasarkan materi pembelajaran yang sudah disusun.
4. Langkah keempat, evaluasi Setelah program pembinaan dilaksanakan, maka akan dilakukan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana warga binaan telah memahami materi pembelajaran.

Dalam prosesnya, memberikan wawasan pengetahuan secara spesifik tidak selalu dilakukan mandiri atau dilakukan sendiri, tetapi adakalanya menyatu dengan kegiatan pembinaan kemandirian berdasarkan hasil kebutuhan karena pada saat dilakukan kegiatan



pelatihan pembinaan kemandirian didalam prosesnya sudah otomatis mengandung wawasan pengetahuan. Hal ini dapat dicontohkan pelaksanaan kegiatan pelatihan Tata Boga dimana peneliti sebagai observasi partisipan dan terlibat pada pelatihan pembuatan Kue Putri Salju dan Cake Jepang. Program pelatihan pembinaan kemandirian oleh mitra kerja sama dilaksanakan dalam 9x pertemuan. Pada awal pertemuan diberikan pengetahuan dasarnya dulu, seperti pemilihan bahan yang baik yang cocok untuk karakter kue yang mau dibuat. Alat yang diperlukan hingga cara pengolahan merupakan pengetahuan dasarnya.

Pertemuan berikutnya yaitu praktik pembuatan kue Putri Salju dan Cake Jepang, mulai membuat komposisi bahan, menyiapkan, membuat adonan, mencetak hingga mengoven dan siap disajikan. Hasil olahan kue akan dinilai dan diberikan evaluasi baik dari segi rasa, tekstur dan tingkat kematangan. Dipertemuan akhir sebelum dilakukan ujian, WBP dibekali dengan pengetahuan: 1) bagaimana cara menjaga kualitas produk, contoh untuk menjaga kualitas kue Putri Salju setelah dikeluarkan dari oven tunggu sampai benar-benar dingin baru dimasukkan ke gula halus dan masuk toples atau kemasan lainnya; 2) cara menghitung biaya yang telah dikeluarkan untuk pembelian bahan ditambah biaya-biaya lain seperti biaya tenaga kerja dan biaya overhead (listrik, biaya alat); 3) menentukan harga jual. Untuk menentukan harga jual WBP harus menghitung dulu seluruh biaya yang dikeluarkan ditambah keuntungan yang diinginkan; 4) menghitung laba rugi, WBP diajarkan cara menghitung laba atau rugi dengan seluruh perolehan uang hasil penjualan dikurangi seluruh biaya yang dikeluarkan; 5) diberikan juga materi cara memasarkan dan strategi pemasaran. Mater yang disampaikan secara manual tersebut meliputi: bagaimana cara memasarkan melalui media sosial. Hasil produksi WBP semenatar baru dikonsumsi pegawai, WBP lainnya dan pengunjung. Jika ada pemesanan dari luar Lapas dapat dilakukan melalui pembina kerja.

Pembinaan kemandirian di Lapas bukan untuk mengisi waktu, melainkan WBP benar-benar disiapkan untuk menghadapi masyarakat dengan stigma negatifnya terhadap WBP yang telah melanggar hukum serta norma sosial di masyarakat. Oleh karenanya, WBP diberikan pembinaan menuju kemandirian ekonomi dalam bentuk pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian selama menjalani masa pidananya. Dijelaskan juga oleh Kepala TU LPP Kelas IIA Tangerang bahwa:

*“... ya memang kita tidak bisa menyalahkan masyarakat kalau masih memiliki stigma negatif pada WBP. Oleh sebab itu pada umumnya yang dicemaskan WBP bukan bagaimana menjalani hidup menjadi warga binaan di Lapas melainkan justru sanksi sosial masyarakat setelah keluar dari Lapas. Kecemasan itu hampir dirasakan hampir semua WBP yang mau keluar.”*

Paparan yang sama juga disampaikan Kepala Lapas Perempuan Kelas IIA Tangerang saat menyerahkan surat ijin riset, bahwa:

*“Tidak dapat menyalahkan masyarakat yang memiliki stigma negatif terhadap alumni WBP karena pada kenyataannya banyak kasus WBP Lapas setelah keluar akan kembali melakukan pelanggaran hukum. Karena mereka tidak memiliki tempat untuk kembali menjadi warga masyarakat normal seperti warga lainnya. Jika keluarga dan masyarakat juga tidak bisa menerima keberadaan alumni WBP di lingkungannya maka akan berpeluang kembali ke komunitas dimana mereka pernah melakukan pelanggaran hukum. Biasanya WBP yang melakukan pelanggaran hukum karena motif ekonomi maka*



setelah keluar Lapas jika tidak mampu secara mandiri memenuhi kebutuhan ekonominya maka upaya yang paling cepat adalah dengan melakukan pelanggaran hukum lagi, dan kembali menjadi WBP.”

Selanjutnya Kalapas Perempuan Kelas IIA Tangerang juga memaparkan bahwa:

“Kejiwaan WBP tidak stabil justru pada saat menjelang keluar dari Lapas. Pola pembinaan kepribadian diberikan tidak cukup membuat warga binaan tersebut percaya diri dan yakin di luar Lapas akan mampu melanjutkan kehidupannya secara normal. Perhatian dan support keluarga tentu sangat diperlukan oleh alumni WBP. Merubah stigma masyarakat memang bukan hal yang mudah namun jika keluarga dekatnya peduli dan memberikan dukungan, harapannya alumni WBP ini tidak kembali melakukan pelanggaran hukum. Pendekatan memanusiakan manusia, kembali pada kodratnya bahwa manusia merupakan makhluk paling mulia bisa menjadi modal mengembalikan kepercayaan dirinya untuk menjalani kehidupan yang lebih baik.”

Secara sistem, pembinaan kemandirian melalui kegiatan kerja terbagi menjadi dua bagian yaitu pelatihan dan keterampilan kerja, serta penyaluran kerja di bidang produksi. Jenis kegiatan pelatihan ditentukan berdasarkan hasil Penelitian Masyarakat (Litmas) dan disesuaikan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Subjek pelatihan dan keterampilan kerja adalah WBP yang telah menjalani 1/3 masa pidananya. Sedangkan subjek kegiatan penyaluran kerja pada unit usaha produksi/industri yaitu WBP yang berdasarkan hasil Litmas mempunyai kebutuhan untuk dapat dilibatkan dalam kegiatan produksi/industri selama yang bersangkutan telah menjalani ½ masa pidana (Standar Kegiatan Kerja dan Produksi 2021).

Permasalahannya, konsep pembinaan belum terlaksana optimal, baru sebatas diberikan pelatihan keterampilan untuk mengisi waktu selama menjalani masa pidananya. Belum ada standar baku terkait dengan pola pembinaan kemandirian yang tepat sasaran bagi WBP. Salah satu faktor penyebabnya, *background* dari setiap individu WBP berbeda. Sementara pembinaannya sendiri belum memiliki spesifikasi keahlian keterampilan tertentu. Seperti pernyataan Koordinator Pembina dan Pelatih WBP Lapas Perempuan Kelas IIA Tangerang bahwa:

“Sekolah kami dulu tidak belajar keterampilan tertentu. Jadi dalam memberikan pembinaan kemandirian dalam bentuk pelatihan ketrampilan kami tidak memiliki keahlian di semua bidang keterampilan yang diberikan, jadi WBP belajar otodidak sesuai dengan sarana dan prasarana yang dimiliki Lapas atau belajar dari sesama WBP yang memiliki keahlian itu.”

Berdasarkan paparan di atas, analisis implementasi *entrepreneurial competencies* di internal Lapas secara rinci dapat disederhanakan sebagai berikut:

1. Penguatan *entrepreneurial competencies* dalam konsep pembinaan belum optimal dilaksanakan.
2. Alumni WBP masih belum bisa sepenuhnya diterima di masyarakat, baik dilingkungan masyarakat, dunia usaha dan industri, maupun di lingkungan pemerintahan, sehingga usaha mandiri atau berwirausaha merupakan satu-satunya alternatif untuk melanjutkan kehidupannya menuju kemandirian ekonomi pun

masih sangat kecil, Hal ini menunjukkan bahwa tujuan pemasyarakatan untuk reintegrasi sosial belum optimal diwujudkan.

3. Jumlah 274.357 WBP ini merupakan kondisi *over capacity* penghuni Lapas dari kapasitas yang tersedia, terbatasnya SDM pembina, terbatasnya alokasi dana pemerintah menjadi faktor pelaksanaan pembinaan di Lapas kurang optimal sehingga tujuan pemasyarakatan juga belum bisa diwujudkan.
4. Pembinaan kemandirian baru ditekankan pada pemberdayaan industri/produksi belum sampai pada penguatan *entrepreneur* yang secara komprehensif meliputi kemampuan untuk manajemen kualitas produk, SDM, pemasaran dan keuangan.

Berbagai fenomena di atas, menjadi faktor-faktor implementasi *entrepreneurial competencies* di Lapas terkendala dan belum optimal, untuk itu perlu dikuatkan konsepnya agar tujuan Lapas dapat diwujudkan. Sudah banyak dilakukan penelitian terkait pemberdayaan pembinaan kemandirian di Lapas tetapi masih sedikit yang mengungkap adanya potensi kewirausahaan UMKM yang dapat ditumbuhkembangkan sehingga dapat meminimalisir kesenjangan antara harapan dengan terwujudnya tujuan yaitu menjadikan warga binaan memiliki keterampilan sosial dan berwirausaha agar setelah keluar Lapas menjadi pelaku usaha dan mandiri secara ekonomi masih belum dapat diwujudkan secara optimal.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan di LPP kelas 1A Tangerang mengenai Implementasi *Entrepreneurial Competency* dapat disimpulkan bahwa konsep pembinaan di Lapas kelas 1A Tangerang dalam hal peninguan *Entrepreneurial Competency* masih belum optimal, Alumni Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) meskipun telah mendapatkan peningkatan keterampilan dalam *Entrepreneurial Competency* namun masih belum bisa sepenuhnya diterima dilingkungan masyarakat, dunia usaha dan industri maupun di lingkungan pemerintah sehingga para alumni sangat sulit untuk bisa mengembangkan keterampilan yang sudah didapatkan ketika di lapas dan untuk melanjutkan kehidupan hanya bisa membuka usaha yang relatif kecil. Hal ini, menunjukkan bahwa tujuan pemasyarakatan untuk reintegrasi sosial belum optimal diwujudkan. Pembinaan kemandirian baru ditekankan pada pemberdayaan industri/produksi belum sampai pada penguatan *entrepreneur* yang secara komprehensif meliputi kemampuan untuk manajemen kualitas produk, SDM, pemasaran dan keuangan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Bolzani, Daniela, and Elena Luppi. 2021. "Assessing Entrepreneurial Competences: Insights from a Business Model Challenge." *Education and Training* 63(2):214–38. doi: 10.1108/ET-04-2020-0072.
- Cetak Biru Pemasyarakatan, 2010.
- Chaker, Hajer, and Houyem Jarraya. 2021. "Combining Teaching 'about' and 'through' Entrepreneurship: A Practice to Develop Students' Entrepreneurial Competencies." *Industry and Higher Education* 35(4):432–42. doi: 10.1177/0950422221991005.

- Ferreras-Garcia, Raquel, Jordi Sales-Zaguirre, and Enric Serradell-López. 2021. "Developing Entrepreneurial Competencies in Higher Education: A Structural Model Approach." *Education and Training* 63(5):720–43. doi: 10.1108/ET-09-2020-0257.
- Haruna, Aliyu Yelwa, and Govindan Marthandan. 2017. "Foundational Competencies for Enhancing Work Engagement in SMEs Malaysia." *Journal of Workplace Learning* 29(3):165–84. doi: 10.1108/JWL-07-2016-0066.
- Man, Thomas W. Y., Theresa Lau, and K. F. Chan. 2002. "The Competitiveness of Small and Medium Enterprises: A Conceptualization with Focus on Entrepreneurial Competencies." *Journal of Business Venturing* 17(2):123–42. doi: 10.1016/S0883-9026(00)00058-6.
- Mitchelmore, Siwan, and Jennifer Rowley. 2010. "Entrepreneurial Competencies: A Literature Review and Development Agenda." *International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research* 16(2):92–111. doi: 10.1108/13552551011026995.
- Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama. Sugiono. 2003. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta J. Moleong. Lexy 2014, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya.